

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Pada Bulan April 2024 Kota Gorontalo terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,21 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,18 pada April 2023 menjadi 105,46 pada April 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,52 persen dan -0,73 persen.

B. Pada bulan Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,28 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,32 pada Mei 2023 menjadi 105,68 pada Mei 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,21 persen dan -0,53 persen.

C. Pada bulan Juni 2024 Kota Gorontalo secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Gorontalo, pada Juni 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,46 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,88 pada Juni 2023 menjadi 105,52 pada Juni 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar -0,15 persen dan -0,68 persen.

Adapun risiko ke depan yang patut mendapat perhatian bersama yaitu adanya Ramadhan dan HBKN Idul Fitri yang pada umumnya mendorong peningkatan permintaan sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan pangan yang cukup tinggi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kota Gorontalo pada triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga cabai disebabkan banyaknya permintaan dalam daerah selama bulan Ramadhan dan memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional. Perubahan iklim el nino berpengaruh pada kenaikan bahan makanan (volatile food) berupa beras, cabai rawit, tomat dan bawang merah (barito)
2. Bensin naik disebabkan oleh adanya keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga bensin atau komoditas administered prices

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi akibat berbagai faktor di atas dan terus menjaga pasokan bagi masyarakat serta dengan harga terjangkau, maka dilaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4K di Kota Gorontalo pada Triwulan II tahun 2023. Adapun sebagai berikut:

1. Himbauan untuk belanja bijak khususnya dalam rangka menyambut dan merayakan Ramadhan dan Idul Fitri (**Komunikasi Efektif**)

Melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) non subsidi melalui Toko Tani di Kelurahan-kelurahan (**Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga**)

3. Gerakan Mari Tanam Rica Sendiri (MATAHARI) dengan menyalurkan bibit rica kepada Masyarakat. (**Ketersediaan Pasokan**)
4. Pemantauan harga dan ketersediaan stok ke pasar tradisional, pasar modern dan distributor dalam rangka Persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (**Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi**)
5. Pelaksanaan Operasi Pasar yang bekerjasama dengan BULOG di 9 (Sembilan) kecamatan. (**Ketersediaan Pasokan, Komunikasi Efektif**)
6. Operasi pasar dan sidak pasar serta pengecekan kepada tingkat distributor (khusus LPG) menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pada triwulan II 2023. Hal ini berdampak positif dimana masyarakat tidak melakukan panic buying untuk melakukan penyimpanan bahan pangan di rumah
7. Mengikuti Capacity Building kepada anggota TPID Se Provinsi Gorontalo dalam hal peningkatan produksi bahan pangan di Jawa Tengah (**Komunikasi Efektif**)

Pembayaran Klaim Asuransi Tani Petani (AUTP) kepada Kelompok Tani yang terkena dampak kekeringan (**Ketersediaan pasokan**)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun evaluasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Kota Gorontalo pada triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Himbauan bijak berbelanja yang dilakukan oleh Walikota, Muspida Kepala KPw BI dan berbagai pimpinan wilayah berdampak baik bagi tingkat konsumsi masyarakat.
2. Pemberian bantuan benih cabai rawit yang terus dilakukan akan mendorong terciptanya produksi dari urban farming yang konsisten dan continuously sehingga pemenuhan cabai rawit dapat langsung dirasakan oleh rumah tangga.
3. Kebijakan berjalan dengan cukup baik dan dapat menahan laju peningkatan harga-harga komoditas tersebut di atas sehingga tidak menyebabkan inflasi terlalu tinggi, terutama kebijakan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah yang dapat menyediakan pasokan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau juga. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Operasi pasar dan sidak pasar serta pengecekan kepada tingkat distributor (khusus LPG) menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pada triwulan II 2024. Hal ini berdampak positif dimana masyarakat tidak melakukan panic buying untuk melakukan penyimpanan bahan pangan di rumah

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan *continuously*, TPID Kota Gorontalo ke depannya akan melakukan berbagai kebijakan, antara lain:

Ketersediaan Pasokan

1. Memberikan bantuan penyaluran bibit cabai rawit kepada masyarakat untuk mendorong urban farming.
2. Pembayaran klaim asuransi usaha tani petani (AUTP) bagi petani yang terkena dampak
- 2.

kekeringan.

Kelancaran Distribusi

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan daerah surplus komoditi sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan komoditi pangan khusus komoditi beras

Keterjangkauan Harga

1. Terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) atau Pasar Murah di berbagai pelosok daerah dan bekerja sama dengan pihak stakeholders lainnya agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien.

Komunikasi Efektif

1. Koordinasi antar Tim Pengendali Inflasi Daerah, perlu di tingkatkan tidak hanya dalam bentuk pertemuan formal namun lebih sering dilakukan pertemuan pertemuan informal.
2. Menyediakan laporan ketersediaan pasokan melalui Neraca Pangan.
3. Terus melakukan monitoring harga khususnya melalui PIHPS Bank Indonesia dan SP2KP Pemerintah.
4. Memperbanyak capacity building khususnya dalam hal inovasi terbaru di bidang pertanian, upaya pengendalian inflasi, dan pelaporan.